

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak hubungan antara pemilik atau pemegang saham dan agen atau manajer. Teori agensi merupakan hubungan kesepakatan antara pemilik dengan agen guna menghasilkan perjanjian kontrak. *Luayyi* (2010) menyebutkan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga memungkinkan manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan banyak pihak. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik. Teori keagenan didasarkan pada hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut teori ini, pemilik memberikan kewenangan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik dan untuk kepentingan pemilik.

Hubungan keagenan berfungsi untuk memahami perilaku individu maupun kelompok yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan cara menguji setiap hal yang dilakukan oleh pihak – pihak bersangkutan untuk memaksimalkan kesejahteraan bersama. Namun ada kalanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer mengakibatkan kedua belah pihak berada pada situasi dan kondisi yang tidak sepaham dan bertentangan. Hal ini biasa disebut dengan konflik atau pertentangan antara *principal* dan *agent*. Menurut *Laela Wulandari* konflik kepentingan dapat terjadi karena dua hal, yang pertama, masalah keagenan yang timbul dari perbedaan tujuan antara *agent* yang telah bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Kedua, masalah keagenan yang timbul dari perbedaan sikap antara *agent* dengan *principal* terkait resiko sehingga memungkinkan manajer mengambil tindakan berbeda dari yang diinginkan oleh *shareholders* karena adanya perbedaan preferensi resiko.

Head at, al. (2007) dalam buku Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan menyebutkan tiga faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah keagenan dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan kepemilikan dan kontrol, dimana orang-orang yang memiliki perusahaan (pemegang saham) tidak mengelolanya tetapi menunjuk agen (manajer) untuk menjalankan perusahaan atas nama mereka.
- b. Tujuan dari manajer (agen) berada dari pemegang saham (prinsipal).
- c. Asimetri dari informasi yang ada antara manajemen dan prinsipal.

Untuk meminimumkan konflik tersebut, maka pemilik membuat perjanjian kontrak dengan manajemen. Dalam konteks ini, kompensasi manajemen akan menurun sedangkan pemilik harus mengeluarkan biaya untuk memonitoring perjanjian kontrak tersebut. Selain membuat kontrak, konflik antara pemilik dan manajemen juga dapat ditangani dengan meningkatkan jumlah kepemilikan manjerial agar kepentingan antara principal dan agent memiliki kesamaan sehingga manajemen dapat membuat keputusan secara aktif. Selain itu, biaya agency juga dapat dikurangi dengan cara memberikan kesempatan bagi investor institusional (kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi).

## **2.2 Kinerja Perusahaan**

Setiap perusahaan pasti didirikan dengan suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus dapat mengelola seluruh sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. Maka dari keberhasilan suatu organisasi dapat diketahui berdasarkan sejauh mana organisasi tersebut telah berhasil mencapai tujuannya dan seberapa besar kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Kemampuan inilah yang disebut dengan kinerja perusahaan. Kinerja yang baik dan optimal, hanya akan dapat dicapai apabila setia pihak - pihak yang berkepentingan dalam perusahaan melakukan kerjasama yang baik. Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Hasil kinerja suatu perusahaan dinilai bukan hanya berdasarkan kuantitas saja, tetapi juga berdasarkan kualitas yang dihasilkan. Seperti yang dinyatakan oleh Mohammad Faisal Amir : “Suatu hal penting dalam melakukan setiap kegiatan penilaian baku mutu (*quality standart*) pada

permasalahan terkait.” Dalam hal ini, baku mutu yang dimaksudkan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan kualitas yang dihasilkan. Untuk menilai pencapaian tujuan perusahaan bukanlah suatu hal mudah karena menyangkut berbagai aspek manajemen yang tidak sedikit jumlahnya. Namun untuk mempermudah menganalisis kinerja perusahaan, secara umum penilaian kinerja perusahaan dilakukan dengan berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tahunan (*annual report*) merupakan laporan yang dicatatkan oleh perusahaan yang memuat berbagai informasi keuangan perusahaan tersebut. *annual report* juga berisi tentang opini manajemen atas operasi perusahaan selama tahun lalu dan proyek yang akan dikerjakan perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor, calon kreditor, dan para pengguna laporan keuangan lainnya dalam rangka pengambilan keputusan. Penilaian kinerja berdasarkan laporan keuangan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio.

Dalam menilai kinerja keuangan atau kinerja perusahaan seringkali dilakukan menggunakan rasio keuangan. Adapun hubungan rasio keuangan dan kinerja perusahaan menurut Bambang at, al. (2017), mengatakan “Analisis rasio keuangan merupakan instrument analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan”.

### ***2.3 Political Connections***

Pada saat ini, politik bagaikan energi besar yang dapat mempengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan stabilitas keamanan suatu negara. Anehnya, Reputasi politik dimata masyarakat cukup tidak baik. Kata *politik* seakan-akan menunjukkan cara menuju hal-hal yang tidak sehat dan berbau kecurangan. Padahal sebenarnya dalam politik masyarakat dapat merundingkan kepentingan masing- masing dan menghasilkan kesepakatan sehingga kepentingan tersebut

dapat terselenggara tanpa merugikan pihak manapun. Walaupun pada kenyataannya tidak semua dan hanya beberapa kepentingan yang dapat terpenuhi. Andrew Heywood dalam buku *Muslim Mufti* mengajukan empat asumsi saat saat kata “politik” diucapkan, yaitu :

a. Politik sebagai Seni Pemerintahan

Artinya, politik adalah penerapan kendali di dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani kuno.

b. Politik sebagai Hubungan Publik

Aristoteles dalam bukunya, *politics*, menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Secara kodrati, maknanya adalah manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik.

c. Politik sebagai Kompromi dan Konsensus

Salah satu asumsi politik dan sebagai kompromi konsensus adalah kompromi konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik tidak ada pihak yang seluruh kepentingannya terpenuhi.

d. Politik sebagai Kekuasaan

Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan “kapital” dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya masyarakat.

Dari keempat asumsi yang diajukan oleh Andrew Heywood tersebut, membuktikan bahwa politik itu penting. Baik untuk mencapai kesejahteraan maupun menjalin hubungan dengan pihak lain. Dengan adanya dampak positif dari politik maka lahirlah suatu hubungan yang disebut dengan koneksi politik (*political connection*). Dalam dunia bisnis, koneksi politik merupakan suatu jembatan yang menjembatani antara pengusaha dengan orang-orang yang menjadi anggota partai politik (politisi) dan menjabat di pemerintahan. Dalam hal ini, hubungan politik boleh terjadi melalui jalinan kerjasama yang dimiliki oleh salah satu pimpinan perusahaan dengan orang-orang yang terjun dalam

dunia politik (parlemen, presiden, wakil presiden, menteri dan politikus) baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **2.4 Kompensasi Direksi**

Insentif merupakan bonus yang diberikan kepada karyawan agar mau bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Insentif dapat berupa pemberian opsi saham atau bonus berbasis kas (Andrian, 2012). Pemberian insentif biasanya terkait dengan kinerja perusahaan, apabila perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi maka bonus yang akan diterima direksi juga lebih tinggi. Pajak sangat mempengaruhi laba perusahaan, sehingga jika direksi dapat mengurangi beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak maka akan meningkatkan laba perusahaan. Armstrong et al., (2012) menyebutkan kompensasi kepada eksekutif berupa gaji tahunan, bonus tahunan, opsi saham tahunan, dan pembayaran yang diharapkan dari rencana jangka panjang. Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi direksi adalah hak tambahan dari perusahaan baik berupa kas maupun non-kas seperti saham. Kompensasi direksi diprosikan dengan total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi selama satu periode akuntansi (Armstrong, et al., 2012).

#### **2.5 Struktur Kepemilikan**

Pada saat melakukan perluasan usaha (*ekspansi*), bisnis pasti akan membutuhkan banyak dana. Oleh karena itu, pemilik perusahaan akan mencari investor yang dapat membantu dalam pendanaan tersebut melalui penjualan saham. Menurut Sitinjak et. al : “pada saat partner berinvestasi maka proporsi kepemilikan akan berkurang.” Proporsi jumlah kepemilikan dalam perusahaan akan mempengaruhi kepentingan antara pemilik dan investor. Dimana besarnya kepemilikan ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki atau ditanamkan. Hal inilah yang memicu munculnya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan pihak yang memiliki saham terbesar dalam suatu entitas yang dapat berupa investor individual, pemerintah dan institusi swasta. Struktur kepemilikan merupakan salah satu hal yang dipercaya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. hal ini disebabkan oleh timbulnya motivasi pemilik untuk memonitor perusahaan serta manajemen dan direksinya dalam mengelola perusahaan tersebut. Terdapat dua

karakteristik kepemilikan yang melibatkan pemilik secara langsung dalam mengontrol kinerja perusahaan yakni, kepemilikan yang menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi.

Struktur kepemilikan yang menyebar mengakibatkan lemahnya pengendalian dari pemilik karena pengawasan yang tidak ketat. Sedangkan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi akan memperkuat pengendalian dalam perusahaan melalui pengawasan intensif pada tindakan manajer agar sesuai dengan keinginan pemilik. Namun terkadang kepemilikan terkonsentrasi juga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena pendapat dan suara pemegang saham kalah dalam pengambilan keputusan walaupun pada kenyataannya hal yang disampaikan itu benar. Pada umumnya kepemilikan yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*) adalah struktur kepemilikan berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik. Adapun yang menjadi pembeda antara masing-masing struktur kepemilikan ini adalah pemilik saham dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, kepemilikan manajerial menyebabkan manajemen ikut serta dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh adanya saham yang menjadi milik pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris).

Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dalam perusahaan, maka kemungkinan terbesarnya adalah manajemen akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Karena pada umumnya manajemen tersebut bekerja untuk kepentingan pemilik. Dan dalam konsep kepemilikan manajerial, manajemen merupakan pemilik. Dengan kata lain, manajer akan berusaha maksimal untuk memberi kepuasan bagi dirinya sendiri. Disatu sisi kepemilikan manajerial merupakan hal yang menguntungkan. Namun disisi lain kepemilikan manajerial juga dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan apabila tingkat kepemilikan manajerial terlalu tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Arum Adianingsih dan Komala Ardiyani : “Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan.”

Dampak buruk yang diakibatkan oleh Kekuatan posisi manajemen bagi perusahaan, adalah manajemen menjadi pusat utama yang harus didengarkan dalam membuat keputusan, sementara pemegang saham yang berasal dari luar perusahaan dengan kepemilikan saham yang porsinya sedikit akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajemen tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial akan memberikan dampak positif bagi perusahaan selama proporsi saham yang dimiliki oleh manajer tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kepemilikan institusional merupakan sejumlah besar saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum dan perwalian. Kepemilikan publik adalah sejumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum melalui pembelian saham yang dijual oleh perusahaan. Pada umumnya, perusahaan akan membuka kesempatan bagi masyarakat/publik untuk ikut serta dalam kepemilikan saham perusahaan hanya jika kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional sudah tidak mampu lagi memonitor tindakan manajemen.

a) Kepemilikan saham institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak pengawas perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Widyawati (2006) memberikan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi Ardiyani et al. (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak mampu untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan.

b) Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial sebagai proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, direksi dan komisaris. Menurut teori keagenan, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan dapat mengurangi konflik keagenan (Meckling et, al. 1976). Manajemen yang memiliki saham tentunya akan lebih mengetahui kondisi sesungguhnya perusahaan yang dia miliki sehingga manajemen yang memiliki saham akan dengan bekerja sebaik mungkin agar manajemen akan memiliki keuntungan dari jabatannya sebagai jajaran manajer serta posisinya sebagai pemilik perusahaan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Political Connection*, *Real Earnings Management*, Komite audit dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Tahun penelitian	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Yusuf, 2021	Pengaruh <i>Political Connections</i> dan Kompensasi Direksi terhadap Kinerja Perusahaan	X, <i>Political Connections</i> dan Kompensasi Direksi Y, Kinerja Perusahaan	Berdasarkan hasil pengujian statistic deskriptif untuk variable <i>Political Connections</i> dapatdiketahui bahwa dari total 126 sampel perusahaan yang menjadi pengamatan, terdapat 86 sampel perusahaan yang merupakan data yang bernilai 0, yang



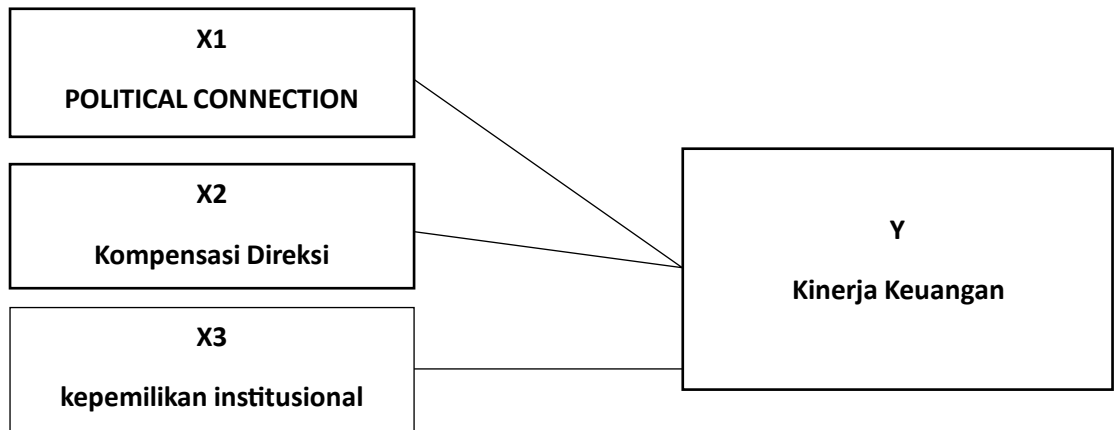
				<p>berarti tidak ada <i>Political Connections</i> dan sebanyak 40 sampel perusahaan yang merupakan data yang bernilai 1, yang berarti ada <i>Political Connections</i>. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh sampel pengamatan didominasi oleh data dari perusahaan yang tidak memiliki <i>Political Connections</i>.</p>
2.	Fatmawati, 2019	PENGARUH POLITICAL CONNECTION, REAL EARNINGS MANAGEMENT, KOMITE AUDIT DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE	X, Political Connection, Real Earnings Management, Komite Audit Dan Komisaris Independen Y, Tax Avoidance	<p>Berdasarkan hasil hipotesis (Ha1) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara <i>Political Connection</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> yang dimana diproksikan dengan variabel dummy yaitu 1 jika kepemilikan saham oleh</p>

				<p>pemerintah di atas 25% dan 0 jika kepemilikan saham oleh pemerintah dibawah 25% artinya koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik mendapat perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kualitas laba dalam laporan keuangan oleh perusahaan dengan koneksi politik secara signifikan lebih buruk dibandingkan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik.</p>
3	Wulandari, et.al, 2013	ANALISIS PENGARUH <i>POLITICAL CONNECTION</i> DAN STRUKTUR	<b>X</b> , Pengaruh <i>Political Connection</i> Dan Struktur Kepemilikan <b>Y</b> , Kinerja Perusahaan	Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel menggunakan

		KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN		rumus Slovin, jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 171 data. Periode pengamatan penelitian ini yaitu tiga tahun (2009-2011) sehingga jumlah perusahaan sampel ialah 57 perusahaan. Setelah dilakukan <i>screening data</i> , jumlah data yang diolah menjadi 145.
4	Windi Alfriani Manik	ANALISIS PENGARUH <i>POLITICAL CONNECTION</i> DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. (PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)	X, Analisis Pengaruh <i>Political Connection</i> Dan Struktur Kepemilikan Y, Kinerja Perusahaan.	

## 2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini maka di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## 2.8 Bangunan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Political Connection terhadap Kinerja Perusahaan

Koneksi politik merupakan hubungan antara manajemen perusahaan dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan dunia politik (parlemen, presiden, wakil presiden, menteri dan politikus). Hubungan ini dapat didasari oleh ikatan kekerabatan dan ikatan keluarga atau ikatan kerjasama. Selain itu, memiliki hubungan dengan mantan politisi pun masih tergolong dalam hubungan politik. Perusahaan memandang bahwa *Political Connection* merupakan salah satu hubungan kerjasama yang cukup menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan perusahaan membangun koneksi politik yaitu untuk meningkatkan nilai dan kinerjanya. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hubungan politik antara lain kemudahan akses untuk memperoleh pinjaman dari bank, dapat menerima tender dari pemerintah, keringanan pajak, memperoleh kemudahan bisnis dalam bentuk kebijakan dan peraturan, serta kemudahan untuk mendapatkan kontrak dan lain sebagainya. Namun, tanpa disadari manfaat yang diperoleh oleh perusahaan melalui hubungan politik menyimpan dampak yang buruk bagi entitas. Misalnya ketika perusahaan memperoleh kemudahan dalam melakukan pinjaman maka akan meningkatkan hutangnya sehingga mengakibatkan beban perusahaan pun

ikut meningkat. Oleh karena itu, manajemen harus tetap memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan, karena politik sangat memberi pengaruh dalam pembuatan suatu keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Rusliaman, et al : “elemen utama dari politik adalah koalisi, memiliki relevansi khusus dengan pembuatan keputusan.”

**H1: *political connection* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.**

### **2.8.2 Pengaruh Kompensasi Direksi terhadap Kinerja Perusahaan**

Insentif merupakan bonus yang diberikan kepada karyawan agar mau bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Insentif dapat berupa pemberian opsi saham atau bonus berbasis kas (Andrian, 2012). Pemberian insentif biasanya terkait dengan kinerja perusahaan, apabila perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi maka bonus yang akan diterima direksi juga lebih tinggi. Pajak sangat mempengaruhi laba perusahaan, sehingga jika direksi dapat mengurangi beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak maka akan meningkatkan laba perusahaan. Armstrong et al., (2012) menyebutkan kompensasi kepada eksekutif berupa gaji tahunan, bonus tahunan, opsi saham tahunan, dan pembayaran yang diharapkan dari rencana jangka panjang. Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi direksi adalah hak tambahan dari perusahaan baik berupa kas maupun non-kas seperti saham. Kompensasi direksi diprosikan dengan total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi selama satu periode akuntansi (Armstrong, et al., 2012).

Kompensasi Direksi merupakan imbalan yang di berikan oleh perusahaan kepada direktur perusahaan atas keahliannya mengelola perusahaan Haman at. al, (2006) melakukan penelitian tentang hubungan antara remunerasi direksi dan CEO dengan kinerja perusahaan pada perusahaan perbankan Australia dengan menggunakan data panel dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2005. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak adanya hubungan yang seimbang dengan kinerja perusahaan. Hubungan remunerasi dengan kinerja perusahaan lebih kuat dan lebih langsung untuk remunerasi CEO dari pada untuk remunerasi keseluruhan direksinya (Musli, 2018)

**H2: Kompensasi Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan**

### **2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja**

**Keuangan** Kepemilikan manajerial juga dapat dikatakan sebagai situasi dimana manajerial sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang ditunjukkan dengan presentase

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan, maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan (Sekaredi, 2011).

Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan cenderung mengelola perusahaan lebih baik karena berkaitan dengan kepentingan manajer tersebut. Pengelolaan perusahaan yang baik ini akan berpengaruh pada tingginya kinerja keuangan. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Yudha, et. Al, (2014) menunjukkan bahwa pengaruh corporate governance dalam hal kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tarigan et. Al, (2007) juga mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial rata-rata kinerja perusahaannya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Atas dasar uraian di atas, hipotesis kedua penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.**